

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Hafiz Tanjung. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development*. 6(1), 14–24.
- Kholmi, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. 07(02), 143–152.
- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)*.
- Kurniawati, Y. (2019). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa*.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lukito, Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nahrudin, Z. (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201.
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020.pdf*. (n.d.).

- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).*
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).*
- Rusydi, H. M. (2012). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar*. 8(2), 152–176.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( Add ) Dan Kebijakan Desa*.
- Siti Ainul Wida, D. S., Taufik Kurrohman, & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ( The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency )*. IV(2), 148–152.
- Sujarweni, V.W.,. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., Hariyati, H., Nafidah, L. N., Kustiningsih, N., & Nadyaningrum, V. (2020). The role of green innovation between green market orientation and business performance: Its implication for open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 173.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*.
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntansi Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*. *Ayaa*, 8(5), 55.
- Yabbar, Rahmah dan Ardhi Hamzah (2015). *Tata kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penebit Pustaka